

IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH PADA ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PADANG

Dita Novelina Risno

Jurusan Administrasi Ilmu Pendidikan FIP UNP

Abstract

This research aims to determine how the implementation of school based management on aspects of community participation in SMA Negeri 1 Padang. Research includes a research descriptive with a population of 66 people. This research didn't use the sample, but all respondents to the research population. The research instrument was a questionnaire in the form of Likert scale. The results indicate implementation of school based management on aspects of community participation in SMA Negeri 1 Padang in good categories with an average score of 4,2.

Keyword: School based management and Community participation

PENDAHULUAN

Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk memberdayakan semua aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, mulai dari masyarakat, orang tua siswa, pemerintah sampai kepada manajemen sekolah itu sendiri. Tujuan pemberdayaan aspek-aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tersebut adalah untuk kepentingan kemajuan pendidikan disekolah, sehingga dengan demikian segala macam kebutuhan di sekolah mulai dari perbaikan sistem pengajaran, perbaikan mutu guru, pengadaan gedung, sarana dan prasarana sekolah sampai kepada pembiayaan lainnya dapat terpenuhi semua ini dilakukan untuk kepentingan proses belajar mengajar siswa di sekolah yang memungkinkan siswa dapat meningkatkan mutu belajarnya.

Penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu sistem nasional, diatur dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003. Aturan yang berkaitan dengan kewenangan daerah tertuang dalam PP No. 25 Tahun 2000, kemudian dipertegas lagi oleh Undang-undang pemberdayaan daerah yang populer disebut desentralisasi yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Semua UU dan peraturan ini dijadikan landasan yuridis dalam mengambil kebijakan dan sekaligus untuk memberdayakan satuan pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah. Adanya Undang-undang dan peraturan tersebut dimaksudkan untuk melakukan perubahan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan dari sistem sentralisasi ke desentralisasi sehingga muncul perubahan penataan manajemen pendidikan.

Manajemen Berbasis Sekolah menurut Bedjo (2007:30) adalah “model manajemen sekolah yang memberikan otonomi kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan langsung semua warga sekolah dan masyarakat yang dilayani dengan tetap selaras dengan kebijakan nasional tentang pendidikan”. Dengan adanya MBS, sekolah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat yang ada.

Dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, tidak ada ketetapan tentang strategi yang digunakan. Strategi implementasi MBS akan berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah lainnya, dan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Namun demikian, implementasi MBS akan berhasil apabila bertolak dari strategi yang mengacu kepada prinsip dan karakteristik MBS itu sendiri.

Manajemen pendidikan merupakan suatu tindakan manajemen yang bertujuan untuk mengatur, mengelola, membimbing, mengarahkan dan mengawasi setiap aktifitas manajemen yang dilakukan orang-orang yang tergabung dalam organisasi pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.

Tujuan pendidikan yang dimaksudkan disini sangat beragam tujuan pendidikan pada tingkat nasional, institusi sekolah sampai tujuan kurikulum. Pencapaian semua tujuan-tujuan diatas dalam aktivitas manajemen ditujukan kepada peningkatan mutu atau kualitas pendidikan.

Sedangkan masalah peningkatan kualitas pendidikan merupakan masalah yang dipengaruhi faktor manajemen itu sendiri, sehingga manajemen pendidikan merupakan salah satu faktor yang amat penting diperhatikan, dibenahi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tersebut.

Adapun aspek-aspek manajemen pendidikan yang perlu diperhatikan menurut Manulang (1981:17) mencakup seluruh lingkup manajemen pendidikan tersebut, mulai dari manajemen kurikulum, kesiswaan, personalia, sarana prasarana sekolah, keuangan sekolah, hubungan masyarakat, lingkungan sekolah sampai kepada ketatausahaan. Untuk mengelola semua komponen diatas, maka sangat diperlukan adanya otonomi yang luas dan kemandirian kepada sekolah untuk melakukan tindakan manajemen yang sekarang dikenal dengan istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) akan dijelaskan pada poin dibawah ini.

Manajemen Berbasis Sekolah sebagai terjemahan dari *school based management* adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan sekolah dan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. Manajemen Berbasis Sekolah sebagai suatu model pengelolaan pendidikan yang bertumpu pada sekolah, banyak diadopsi oleh system persekolahan untuk meningkatkan otonomi sekolah dan member kesempatan kepada guru-guru, orang tua siswa dan anggota masyarakat dalam pembuatan keputusan.

Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menurut Sujanto (2007:30) adalah : ”model manajemen sekolah yang memberikan otonomi kepada

sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan langsung semua warga sekolah dan masyarakat *stakeholder* yang dilayani, dengan tetap selaras dengan kebijakan nasional tentang pendidikan”.

Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kepada kelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Sejalan dengan jiwa dan semangat desentralisasi serta otonomi dalam bidang pendidikan, kewenangan sekolah juga berperan dalam.

Karakteristik MBS bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerjanya, proses pembelajaran pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta sistem administrasi. MBS adalah model pengelolaan sekolah berdasarkan kekhasan, kemampuan dan kebutuhan sekolah. Depdiknas (2007:45) “tata kelola MBS yang baik meliputi partisipasi, transparansi dan akuntabilitas”.

Menurut Engkoswara (2011: 295) bahwa partisipasi penting untuk meningkatkan rasa memiliki, peningkatan rasa memiliki akan meningkatkan rasa tanggung jawab, dan peningkatan tanggung jawab akan meningkatkan dedikasi atau kontribusi. Partisipasi adalah proses dimana *stakeholder* terlibat aktif baik dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengevaluasian pendidikan di sekolah.

Transparansi menurut Engkoswara (2011:295) adalah manajemen sekolah dilaksanakan secara transparan, mudah diakses anggota, manajemen memberikan laporan secara kontiniu sehingga *stakeholders* dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Manajemen pendidikan yang transparan memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan keyakinan *stakeholders* terhadap kewibawaan dan citra sekolah *good government and clean govermance*.

Keberhasilan transparansi sekolah ditunjukkan oleh beberapa indikator menurut Depdiknas (2007:50) sebagai berikut : 1) Meningkatnya keyakinan dan kepercayaan publik kepada sekolah bahwa sekolah adalah bersih dan wibawa. 2) Meningkatnya partisipasi publik terhadap penyelenggaraan sekolah. 3) Bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan sekolah. 4) Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di sekolah.

MBS memberi kewenangan yang lebih besar kepada penyelenggara sekolah yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus sekolah, mengambil keputusan, mengelola, memimpin, dan mengontrol sekolah agar penyelenggara sekolah tidak sewenang-wenang dalam menyelenggarakan sekolah, maka sekolah harus bertanggung jawab kepada publik tentang apa yang dikerjakan sebagai konsekwensi dari madat yang diberikan oleh publik atau masyarakat. Jadi, akuntabilitas itu sangat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap sekolah. Karena pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pihak sekolah tetapi publik juga ikut serta dalam hal tersebut.

Penerapan MBS secara menyeluruh sebagai realisasi desentralisasi pendidikan memerlukan perubahan-perubahan mendasar terhadap aspek-aspek yang menyangkut pada pelaksanaan 1) Peran serta masyarakat, 2) Peran komite sekolah.

Menurut Gunawan (2002: 186) peran serta masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta dari publiknya pada khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sebaliknya sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah berkewajiban memberi penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Sebaliknya, sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat, terutama terhadap sekolah. Dengan perkataan lain, antara sekolah dengan masyarakat harus dibina dan dikembangkan suatu hubungan yang harmonis agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Komite sekolah merupakan suatu wadah atau tempat yang berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol setiap kebijakan yang dilakukan sekolah, komite sekolah juga mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan melalui proses belajar mengajar.

Dalam lampiran II Kepmendiknas No. 044 tahun 2002 komite sekolah didefinisikan sebagai: “Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah”. Dapat disimpulkan bahwa komite sekolah merupakan suatu wadah atau lembaga yang dibentuk untuk membantu sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran serta masyarakat dengan komite sekolah mempunyai kaitan yang sangat erat dalam pencapaian tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Dimana peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Peran serta masyarakat itu tidak hanya berupa dukungan dana atau sumbangan fisik saja, tetapi bisa lebih dari itu. Dukungan masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah melibatkan peran serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, dunia usaha dan dunia industri, serta kelembagaan sosial budaya. Peran serta orang tua dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah dapat disesuaikan dengan latar belakang sosial ekonomi dan kemampuan orang tua. Orang tua merupakan salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS). Manajemen berbasis sekolah dapat berjalan dengan baik apabila komite sekolah diberdayakan secara optimal. Komite sekolah dibentuk sebagai mitra sekolah dalam mengembangkan diri menuju peningkatan kualitas pendidikan. Dalam pelaksanaannya komite sekolah bekerja berdasarkan fungsi-fungsi manajemen.

Namun dalam implementasi MBS belum berjalan sebagaimana yang diharapkan terutama pada sekolah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena-fenomena berikut: Kerjasama antara sesama warga sekolah, warga sekolah dengan masyarakat belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil observasi penulis tanggal 20 Februari 2015 pada salah seorang pengurus komite yang menyatakan bahwa masih ada beberapa sekolah yang kurang melibatkan orang tua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah. Pelibatan orang tua dan masyarakat hanya dilakukan ketika ada kegiatan kenaikan kelas atau kelulusan yaitu dalam hal perbaikan sarana sekolah atau memperbaiki aspek fisik sekolah saja yang diwujudkan dalam bentuk sumbangan komite sekolah.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Pada Aspek Peran serta Masyarakat di Sekolah Menengah atas Negeri 1 Padang”.

Permasalahan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah adalah kerjasama antara sesama warga sekolah dengan masyarakat belum terlaksana dengan baik,. Hal tersebut dilihat dari prinsip tata sekolah yang baik yakni, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Keterlaksanaan prinsip tata kelola sekolah tersebut dilihat dari ruang lingkup MBS itu sendiri. Ada tujuh ruang lingkup MBS yang harus dikelola dengan baik yakni, pada pelaksanaan manajemen kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, keuangan, kesiswaan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, serta manajemen layanan khusus lembaga pendidikan.

Manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya mempunyai pengertian yang hampir sama dengan manajemen pendidikan. Ruang lingkup dan kajian manajemen sekolah juga merupakan ruang lingkup manajemen pendidikan, namun demikian manajemen pendidikan mempunyai jangkauan yang lebih luas dari manajemen sekolah. Hal yang paling penting dalam implementasi MBS adalah manajemen terhadap komponen-komponen sekolah itu sendiri.

Namun, karena berbagai keterbatasan dan untuk lebih fokusnya penelitian ini maka yang akan diteliti dibatasi pada 2 aspek yaitu: (1) pelaksanaan MBS pada peran serta masyarakat, (2) pelaksanaan MBS pada peran komite.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi manajemen berbasis sekolah pada aspek peran serta masyarakat di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padang.

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis ajukan untuk dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah implementasi MBS pada peran serta masyarakat dan peran komite sekolah dalam aspek partisipasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padang? 2) Bagaimanakah implementasi MBS pada peran serta masyarakat dan peran komite sekolah dalam aspek transparansi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padang? 3) Bagaimanakah implementasi MBS pada peran serta masyarakat dan peran komite sekolah dalam aspek akuntabilitas di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padang?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan komite di SMA Negeri 1 Padang yang berjumlah 66 orang. Penarikan sampel yang dianggap dapat mewakili populasi dengan mengacu pada pendapat Arikunto (2006:134) “apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi”. Oleh sebab itu penelitian ini adalah penelitian populasi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang sumbernya adalah kepala sekolah, guru dan komite. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah angket model skala likert dengan alternatif jawaban yaitu selalu (SL), sering (SR), kadang-kadang (KD), jarang (JR), dan tidak pernah (TP).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Secara umum hasil pengolahan data mengenai Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Pada Aspek Peran Serta Masyarakat di Sekolah Menengah atas Negeri 1 Padang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Rekapitulasi Skor Rata-Rata Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah pada Aspek Peran Serta Masyarakat di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padang

| No | Sub Variabel | Indikator | Skor |
|----------------|------------------------|------------------|------------|
| 1 | Peran Serta Masyarakat | 1. Partisipasi | 4,1 |
| | | 2. Transparansi | 4,1 |
| | | 3. Akuntabilitas | 4,2 |
| Jumlah | | | 4,1 |
| 2 | Peran Komite Sekolah | 1. Partisipasi | 4,3 |
| | | 2. Transparansi | 4,2 |
| | | 3. Akuntabilitas | 4,1 |
| Jumlah | | | 4,2 |
| Skor Rata-rata | | | 4,2 |



Gambar 1
Histogram Distribusi Frekuensi Skor Variabel Peran Serta Masyarakat

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa peran serta masyarakat dapat terlaksana dengan baik yaitu dapat diperoleh skor rata-rata 4,1. Kemudian, pada peran komite dapat diperoleh skor rata-rata 4,2 dengan kategori Baik.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen berbasis sekolah pada aspek peran serta masyarakat di sekolah menengah atas negeri 1 padang sudah terlaksana dengan baik dapat memperoleh skor rata-rata yaitu **4,2** dengan kategori **Baik**.

PEMBAHASAN

Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Peran serta masyarakat itu tidak hanya berupa dukungan dana atau sumbangan fisik saja, tetapi bisa lebih dari itu. Menurut Dalam Depdiknas (2002:3) dikemukakan bahwa manajemen berbasis sekolah sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas atau keluwesan-keluwesannya kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah dan karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha dan sebagainya) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa implementasi manajemen berbasis sekolah pada peran serta masyarakat sudah dapat terlaksana dengan baik yang memiliki skor rata-rata 4,1.

Kepala sekolah sebagai seorang manajer di sekolah diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan masyarakat, agar masyarakat lebih berperan aktif dalam manajemen berbasis sekolah untuk kemajuan mutu pendidikan di sekolah.

Dalam MBS sekolah, sekolah dituntut memberikan otonomi lebih besar kepada masyarakat untuk memberikan fleksibilitas atau keluwesan-keluwesannya, serta mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah dan karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha dan sebagainya) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), Komite sekolah merupakan suatu wadah atau tempat yang berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol setiap kebijakan yang dilakukan sekolah, komite sekolah juga mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan melalui proses belajar mengajar.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa secara umum implementasi manajemen berbasis sekolah ditinjau dari peran komite sekolah sudah terlaksana dengan baik dengan skor rata-rata 4,2.

Keberhasilan MBS sangat ditentukan oleh keberhasilan pimpinannya dalam mengelola sekolah. Dalam hal ini, bahwasanya komite sekolah merupakan suatu wadah atau lembaga yang dibentuk untuk membantu sekolah dalam

meningkatkan mutu pendidikan. Oleh sebab itu pimpinan dengan komite sekolah harus menjalin hubungan yang harmonis agar komunikasi pimpinan dengan komite sekolah bisa berjalan dengan baik, agar sekolah bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen berbasis sekolah pada aspek peran serta masyarakat di sekolah menengah atas negeri 1 padang sudah terlaksana dengan baik dengan memperoleh skor rata-rata 4,2, baik yang berasal dari aspek peran serta masyarakat maupun dari aspek peran komite sekolah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya mengenai implementasi manajemen berbasis sekolah pada aspek peran serta masyarakat di SMA N 1 Padang dapat diartikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi manajemen berbasis sekolah pada aspek peran serta masyarakat di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padang dalam peran serta masyarakat yang dilaksanakan secara partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas terlaksana dengan baik (4,12).
2. Implementasi manajemen berbasis sekolah pada aspek peran serta masyarakat di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padang dalam peran komite sekolah yang dilaksanakan secara partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas terlaksana dengan baik (4,19).
3. Secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen berbasis sekolah pada aspek peran serta masyarakat di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padang terlaksana Baik dengan skor rata-rata (4,15).

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan diatas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi kepala sekolah diharapkan untuk dapat meningkatkan implementasi manajemen berbasis sekolah terutama pada SMA Negeri 1 Padang. Upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan implementasi manajemen berbasis sekolah tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan saluran komunikasi yang dapat menyalurkan aspirasi warga sekolah *stakeholders* pendidikan. Selanjutnya untuk mendorong terciptanya kepercayaan warga sekolah *stakeholders* terhadap sekolah, pihak sekolah harus benar-benar mampu memberikan pertanggung jawaban hasil kerjanya kepada publik dan menanggapi pertanyaan dan pengaduan publik yang bersifat membangun.
2. Bagi guru, untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan serta kualitas sekolah. Supaya sekolah bisa menjadi sekolah yang lebih baik dan bermutu.
3. Komite sekolah untuk dapat menjadi sumber informasi dalam meningkatkan peran sertanya didunia pendidikan.
4. Peneliti, diharapkan untuk menelaah serta meneliti lebih lanjut mengenai judul yang sama dengan mengambil objek yang berbeda.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bedjo Sujanto. 2007. *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah*. Jakarta : CV. Sagung Seto.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Engkoswara & Komariah, Aan. (2011). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Gunawan, Ary H (2002). *Administrasi Sekolah Administrasi Pendidikan Mikro*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rusdinal. 2007. *Memetik Beberapa Pelajaran dari Manajemen Berbasis Sekolah*. Padang : Tim Editor UNP Press.